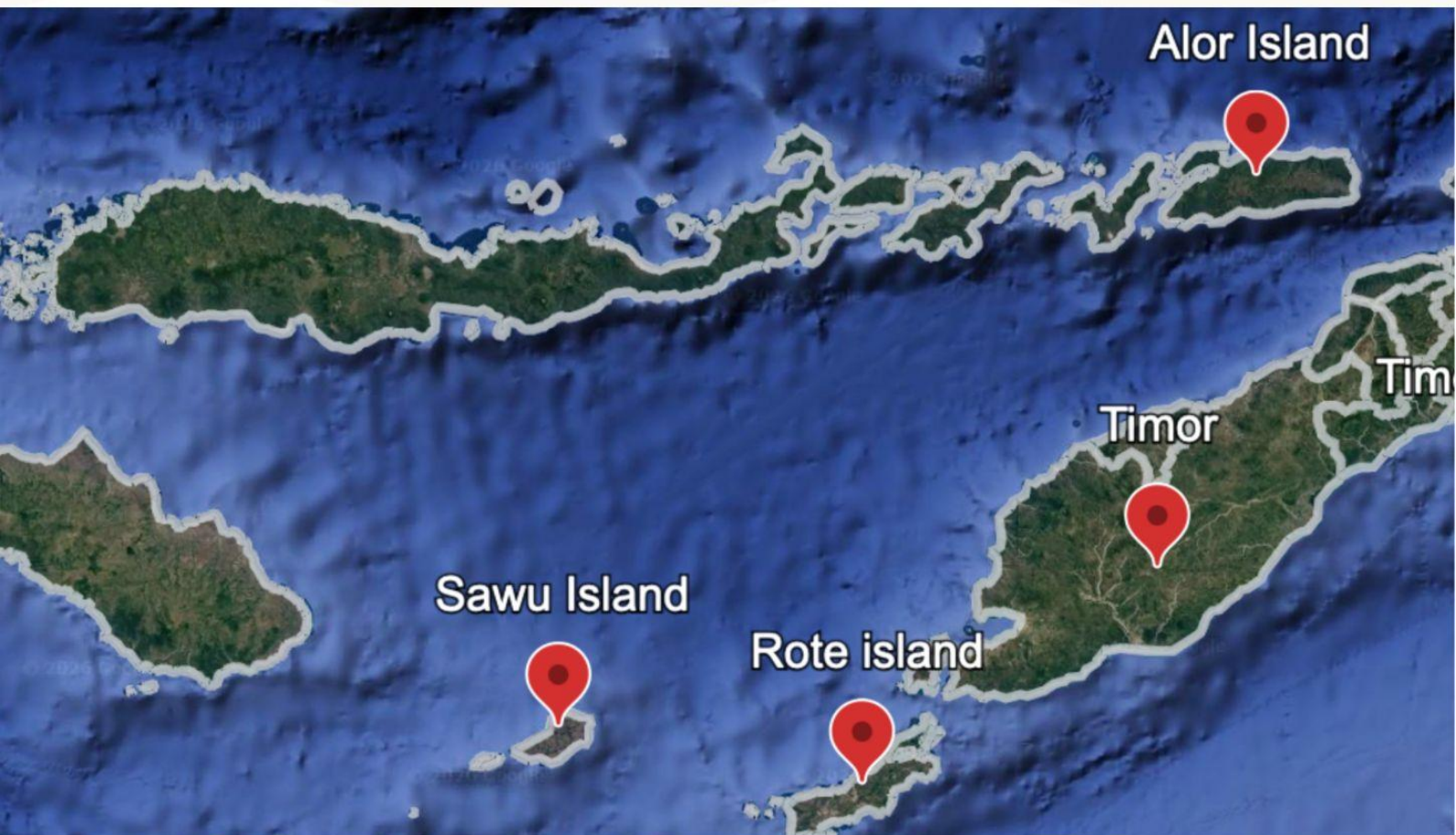


Menguatkan Gerakan Masyarakat Sipil yang Terhubung & Berkelanjutan

Pulau Tirosa

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Regio Pulau Timor, Rote, Sabu, Alor
2026



Civic Engagement Alliance
2026



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dulunya bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Sejak tahun 1958, Sunda Kecil dipecah menjadi tiga provinsi yaitu NTT, NTB, dan Bali. Provinsi NTT terletak di sebelah tenggara Indonesia. Berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi NTB di sebelah barat. Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau dan tidak semua pulau berpenghuni. Lima pulau besar di NTT dikenal dengan nama 'Flobamorata' yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata.¹

Di Kupang, terdapat monumen TIROSA. Sebutan TIROSA berasal dari singkatan tiga wilayah di Provinsi NTT yaitu Timor, Rote, dan Sabu. Monumen ini menjadi simbol persatuan masyarakat dan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan tokoh-tokoh besar NTT. Meskipun TIROSA sebenarnya hanya tertulis tiga wilayah itu, dalam konteks konsolidasi ini ditambahkan Alor.² Pulau TIROSA, termasuk Alor terdapat sembilan kabupaten/kota. Pulau Alor dengan Kab. Alor. Pulau Timor terdiri 6 kota/kab, di antaranya Kota Kupang, Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Kab. Malaka. Pulau Rote terdapat Kab. Rote Ndao dan Pulau Sabu dengan Kab. Sau Raijua.³



Gambar.1 Peta Membaca Konteks Pulau Tirosa

¹ Localise SDGs Indonesia, "Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur", <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/17>, diakses 7 Juni 2026; BPK RI, "Pemerintah Provinsi NTT", <https://ntt.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-ntt/>, diakses 7 Juni 2026.

² Kupang.today, "Orang Kupang Tahu TIROSA, tapi Belum Tentu Tahu Sejarahnya", 12 Mei 2026, https://www.instagram.com/p/DY058sUE09R/?img_index=3, diakses 7 Juni 2026.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor, diakses 7 Juni 2026; <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-nusantara/wisata-pulau-timor-daftar-enam-kabupaten-dan-spot-eksotisnya>, diakses 7 Juni 2026; https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sabu_Raijua, diakses 7 Juni 2026

Dengan meninjau pulau-pulau TIROSA, daya dukung sosio-ekologis di sana masih diwarnai oleh tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat. Berbagai proyek dan penggunaan sumber daya menimbulkan titik-titik kerusakan ekologi, termasuk pesisir. Contohnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kupang dan Rote serta Konflik Lahandi Timor Tengah Selatan. Sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan konflik berpotensi munculnya kriminalisasi warga maupun aktivis yang memperjuangkan lingkungan atau ruang hidupnya. Situasi ini berkelindan dengan berbagai persoalan struktural yang masih dihadapi masyarakat seperti perubahan iklim, kemiskinan, militerisme, keterbatasan akses layanan dasar. Kasus lain yang cukup tinggi juga di Pulau Timor di antaranya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, dan kesehatan mental.

Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil & Keterlibatan Masyarakat Sipil

Konsolidasi masyarakat sipil ini meliputi wilayah Pulau Timor dan sekitarnya seperti Sabu, Rote, dan Alor. Konsolidasi dilaksanakan pada 12-13 Maret 2026 di Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi berjenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencakup tiga klaster utama. Sebanyak 24 OMS yang berpartisipasi terdiri dari 21 organisasi mengikuti secara offline dan tiga organisasi secara online.

Pelaksanaan konsolidasi di Provinsi NTT dirancang berdasarkan pembagian wilayah pulau yang meliputi tiga klaster utama, yaitu: Pulau Timor beserta pulau-pulau sekitarnya (Sabu,

Rote, dan Alor), Pulau Sumba, serta Pulau Flores termasuk Lembata. Konsolidasi ini dimaksudkan sebagai proses berjenjang dan saling terhubung. Pertemuan di masing-masing pulau menjadi ruang untuk menghimpun analisis, pengalaman, serta agenda bersama masyarakat sipil di tingkat wilayah. Hasil dari setiap konsolidasi pulau akan dirajut dan dipertemukan pada tahap akhir sebagai refleksi dan penguatan bersama.

Berdasarkan bacaan konteks, ruang sipil di wilayah TIROSA menunjukkan dinamika yang kompleks. Konsentrasi kerja OMS justru masih sangat terpusat di Kota Kupang sebagai pusat kebijakan provinsi. Wilayah yang minim jangkauan OMS adalah Rote Ndao dan Belu. Refleksi ini juga mengungkap adanya ancaman serius berupa kriminalisasi aktivis dan sebaran titik kerusakan ekologi. Selain itu, masyarakat sipil harus berhadapan dengan isu-isu krusial seperti militerisasi, perubahan iklim, kemiskinan, konflik lahan, hingga tingginya isu kesehatan mental dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Maka dari itu, masyarakat sipil penting memperkuat posisinya dalam mempertahankan ruang geraknya di tengah situasi penyempitan ruang sipil.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di Sumbagsel

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di Pulau Tirosa membuka gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Gambaran singkat dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut:

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Stigma terhadap OMS menjadi tantangan bagi OMS di wilayah Timor. Disebut sebagai provokator, kelompok pro perceraian bagi OMS di isu hak-hak perempuan, jual isu, dll. Stigma tersebut tergantung situasi seperti konteks konflik atau posisi OMS di mata pemerintah. Di tengah stigma yang ada, kerja-kerja pengorganisasian basis tetap berjalan melalui pendekatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (ekonomi, pertanian, dll), pendekatan sosial kultural berupa 3 sama (sama makan, sama tinggal, dan sama kerja), dan ragam pendekatan lainnya. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pengorganisasian melalui pembentukan organisasi mandiri, membentuk aktor-aktor lokal, pelibatan orang muda, dan penguatan jaringan lintas isu maupun wilayah. Namun, pengorganisasian masih menghadapi tantangan regenerasi, perlindungan bagi pengorganisir di isu-isu kritis, bertopang pada donor, lemahnya perspektif

interseksionalitas, serta belum optimalnya dukungan pemerintah dan aktor politik strategis terhadap keberlanjutan gerakan masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Konsolidasi dan refleksi lintas komunitas dan OMS untuk update konteks dan membangun strategi bersama secara berkala
2. Reformulasi model-model pengorganisasian basis/komunitas yang mampu merespon kebutuhan perkembangan zaman
3. Pengembangan konsep dan metode kaderisasi dalam gerakan masyarakat sipil dan meletakkan kerja-kerja pengorganisasian basis sebagai bagian penting dalam kaderisasi.

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Beberapa organisasi telah menjalankan sistem pengelolaan pengetahuan dan kebijakan perlindungan (safeguarding) serta mulai memanfaatkan media sosial dan data untuk mengembangkan strategi advokasi. Namun, belum ada sistem yang dikelola bersama dan berkelanjutan. Hal itu diperparah dengan adanya ego organisasi masih terjadi saat advokasi bersama, berbasis program, dan terbatas pada upaya sporadis. OMS di Timor pernah ada di momen cukup aktif dalam konsolidasi gerakan merespons situasi politik di Timor, tetapi hal tersebut tidak berkelanjutan. Bahkan, advokasi mengalami kecenderungan bergeser dari advokasi “hard” ke “advokasi lunak” atau membuat posisi OMS terasa “aman”. Salah satu faktornya terkait peningkatan ancaman ruang sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Dashboard pengetahuan bersama masyarakat sipil Timor yang dikelola dan bisa diakses secara kolektif
2. Sistem informasi bersama masyarakat sipil
3. Analisis aktor kawasan Timor dan membangun protokol keamanan/perlindungan bersama OMS (termasuk perlindungan rumah aman)

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil di Timor dihadapkan pada tantangan kesenjangan generasi akibat perbedaan minat, cara berorganisasi, pola komunikasi, penguasaan isu, dsb. Gap generasi

ini juga menyebabkan krisis kader pada OMS meskipun telah menyediakan ruangnya seperti pelatihan. Berbagai upaya mengatasi gap dengan mengakomodir kepentingan individu (gen z) dengan kepentingan organisasi dan mengembangkan pola kerja menyesuaikan minat dan keahlian gen z. Kondisi eksisting berkenaan keterhubungan antarorganisasi pun umumnya masih berjalan berdasarkan kepentingan isu, program, atau kasuistik. Hal ini menunjukkan belum ada konektivitas yang kuat dan berkelanjutan, termasuk potensi kepakaran yang masih tersebar.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun sistem database terkait pengetahuan dan kepakaran lintas OMS
2. Menghidupkan wadah-wadah kaderisasi yang sudah dibangun beberapa organisasi sebagai ruang kaderisasi bersama dalam gerakan OMS
3. Menghidupkan ruang-ruang konsolidasi bersama lintas isu/program untuk sharing pembelajaran, update konteks dan mendiskusikan strategi-strategi advokasi bersama, dengan melibatkan generasi baru dan kelompok-kelompok inklusi, dan menjangkau organisasi-organisasi di berbagai wilayah

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Pendanaan kolaboratif biasanya hanya muncul dalam situasi darurat atau kasus tertentu dan membentuk konsorsium untuk mengelola dana hibah bersama. Pendanaan tersebut masih belum dapat dikatakan berkelanjutan. Berbagai praktik mengupayakan pendanaan lain turut berjalan, misalnya jualan produk kerajinan dan hasil pertanian, memadukan gerakan adopsi terumbu karang dengan program trip berbayar, serta akses CSR perusahaan fashion untuk isu perempuan dan anak. Sembari mengerjakan upaya-upaya itu, OMS juga memperkuat posisi tawar dengan donor melalui berpusat pada nilai, visi misi, dan standar organisasi, termasuk prosedur pembiayaan atau management fee. Singkatnya, beragam inisiatif untuk memperkuat keberlangsungan akses sumber daya organisasi, tetapi belum mendukung keberlanjutan gerakan kolektif untuk kemandirian.

Rekomendasi Prioritas

Membangun pendanaan kolaboratif yang dikelola bersama dan berkelanjutan.

Dimensi Regulasi Pendukung

Masyarakat sipil cukup aktif dan berpengalaman dalam mempengaruhi kebijakan dari tingkat lokal hingga nasional. Beberapa kebijakan yang berhasil didorong adalah Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan mangrove, Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Perbup tentang anak tidak sekolah, Perdes tentang Desa Inklusi, dll. Perubahan skema penyusunan regulasi seperti keharusan melalui Kementerian Hukum atau BPHN menyebabkan kesulitan OMS untuk mendorong inisiatif regulasi. Hambatan OMS dalam bergerak juga karena keberadaan regulasi restriktif seperti UU Cipta Kerja dan UU Ormas. Selain itu, implementasi regulasi yang berpihak masyarakat sipil cukup lemah akibat kapasitas aparaturnya pelaksana dan regulasinya memang tidak implementatif.

Rekomendasi Prioritas

1. Menemukan dan menyuarakan isu advokasi bersama yang mengarah pada konteks persoalan yang terjadi di Timor/NTT (dapat menyasar regulasi yang relevan).
2. Konsolidasi advokasi regulasi bersama menggunakan perspektif interseksionalitas.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Konsolidasi gerakan yang berkembang umumnya berbasis isu, penanganan kasus, dan situasi darurat seperti agraria-lingkungan dan kebencanaan. Tiap konsolidasi dibarengi dengan kesadaran atas kebutuhan saling terhubung dan gerakan jangka panjang. Kekuatan masyarakat sipil di Timor juga tergambar melalui narasi advokasi yang dibangun semakin banyak menggunakan kearifan lokal dan budaya seperti konsep "Keban lewa lolon" dan "lilifuk" terkait konservasi laut hingga "Mira kadikhari do memudi paralae" tentang gotong royong untuk kerja sosial. Sayangnya, integrasi perspektif GEDSI belum menjadi pembahasan yang mengemuka dalam konsolidasi ini meskipun terdapat konsolidasi kasus femisida sebagai ajang konsolidasi lintas isu.

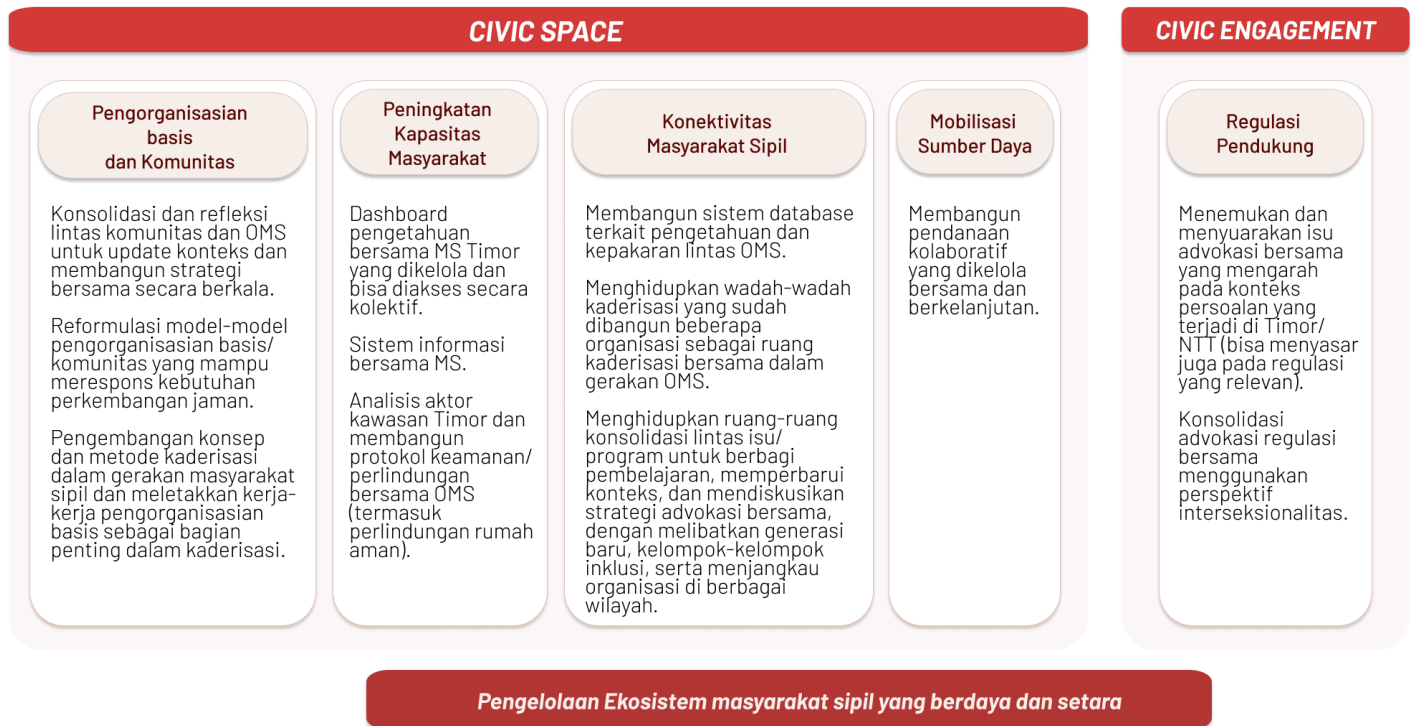
Dimensi Demokrasi Ekonomi

Inisiatif ekonomi berbasis komunitas dimunculkan melalui produksi pangan lokal oleh kelompok perempuan, usaha salon kecantikan, ternak babi dan kambing. Pelembagaan ekonomi berbasis komunitas lewat Dana Nusantara memperkuat inisiatif tersebut. Penting juga untuk memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran digital dengan menggandeng

pemerintah desa hingga pusat. Kendala yang dihadapi adalah perizinan terkait usaha dan konsistensi kualitas produk.

Sintesis Penilaian CIVICA Tirosa

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik menghasilkan rangkuman rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 2. Sintesis Penilaian CIVICA TIROSA

Kesimpulan

Konsolidasi masyarakat sipil di wilayah Pulau TIROSA menggambarkan dinamika ruang sipil yang kompleks dan penuh tantangan. Diskusi bersama mengidentifikasi bahwa kerja-karya OMS masih terpusat di Kota Kupang, sementara wilayah seperti Rote Ndao dan Belu paling minim jangkauan. Di tengah ancaman serius berupa kriminalisasi aktivis, militerisasi, konflik lahan, perubahan iklim, dan TPPO, gerakan masyarakat sipil juga menghadapi tantangan internal seperti ketergantungan pada donor, krisis regenerasi, ego organisasi, dan lemahnya konektivitas dan perspektif interseksionalitas dalam advokasi bersama.

Meski demikian, terdapat kekuatan yang patut dirawat. Masyarakat sipil TIROSA memiliki berbagai kekuatan berupa tetapi tidak terbatas pada: (1) kekayaan narasi advokasi berbasis kearifan lokal, (2) rekam jejak keberhasilan intervensi kebijakan dari tingkat desa hingga

nasional, dan (3) membangun beragam inisiatif ekonomi komunitas. Dengan beberapa tantangan dan modal yang cukup kuat, masyarakat sipil TIROSA perlu memperkuat konsolidasi lintas isu dan wilayah secara berkala, membangun sistem informasi dan pendanaan kolektif yang berkelanjutan, serta memperkuat perlindungan bagi para pengorganisir demi menjaga ruang sipil yang semakin tertekan.